



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.275/PMK/05/2022  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan  
Instruksi Presiden Nomor 3  
Tahun 2022

Jakarta, 24 Mei 2022

Kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;**
- 2. Menteri Dalam Negeri;**
- 3. Menteri Kesehatan; dan**
- 4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat disampaikan salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2022.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



*Yuli Harsono*

**Yuli Harsono**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet, sebagai laporan; dan
2. Wakil Sekretaris Kabinet.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Agama;
  4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  5. Menteri Kesehatan;
  6. Menteri Sosial;
  7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

10. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak;
13. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Nasional;
14. Para Gubernur; dan
15. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :

- PERTAMA** : Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
1. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;
  2. perubahan perilaku keluarga;
  3. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
  4. penataan lingkungan keluarga.

KEDUA: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Khusus kepada

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  
2. Menteri Dalam Negeri, untuk:
  - a. mendorong komitmen Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bersama Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya;
  - b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang kegiatannya diputuskan melalui musyawarah desa dan merupakan kewenangan desa;

c. melakukan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
  - d. memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi desa dalam penggunaan Dana Desa untuk menyelenggarakan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa sesuai dengan kewenangan desa.
  4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terkait Kampung Keluarga Berkualitas.
  5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
    - a. pengoordinasian...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di wilayah setingkat desa/kelurahan;
- b. fasilitasi teknis penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- c. pengoordinasian dan peningkatan pelibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) setiap satu tahun sekali; dan
- f. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Para...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Para Gubernur untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
  - a. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
  - b. penguatan komitmen Bupati/Wali Kota untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
  - c. pembinaan dan pengawasan baik secara umum maupun teknis terhadap penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
  - e. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

f. pemberian...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan
  - g. fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
7. Para Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
- a. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
  - b. penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
  - d. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Gubernur 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - e. pemberian...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA : Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



*Yuli Harsono*

Yuli Harsono



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS

**INTEGRASI DAN KONVERGENSI KEGIATAN OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
1. Penyediaan data dan dokumen kependudukan	Penyediaan data dan dokumen kependudukan	1) Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu)	Persentase rumah data kependudukan paripurna yang terbentuk di Kampung KB	Rumah DataKu	60	68	75	80	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa
		2) Pelayanan dokumen kependudukan	a) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d 17 tahun	Persentase	95	97	98	99	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

b) Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			b) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	Persentase	100	100	100	100	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			c) Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
2. Perubahan perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	1) Program GERMAS	a) Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	Persentase	35	40	45	50	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan pos pelayanan terpadu (posyandu) aktif	Persentase	70	90	100	100	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		2) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan PISPK dengan 100% intervensi keluarga	Kabupaten / Kota	200	300	400	514	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		3) Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	a) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	75	80	85	90	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase keluarga balita dan anak yang mengikuti BKB	Persentase	50	50,5	51	51,5	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			c) Persentase PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Persentase	75	80	85	90	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

d) Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			d) Persentase keluarga yang mengikuti pembinaan BKR	Persentase	31,46	33,46	35,46	37,46	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			e) Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	Persentase	13	14	15	16	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		4) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga	a) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran, dan wilayah	Persentase	40	50	60	70	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	Persentase	60	70	80	90	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

c) Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			c) Persentase pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	Persentase	40	50	60	70	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		5) Bimbingan calon pengantin	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	Persentase	75	80	85	90	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		6) Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	Persentase	74,92	79,08	83,24	85,74	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

7) Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		7) Bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan	Terselenggaranya bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan	Provinsi	50	70	100	100	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
				Kabupaten /Kota	35	50	70	90		
		8) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan KTR	Kabupaten /Kota	374	424	474	514	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

3. Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
3. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	a. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumber-daya masyarakat	1) Penggerakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	Persentase	65	70	75	85	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		2) Edukasi kesehatan ibu hamil, bayi berusia di bawah lima tahun (balita), remaja, dan lansia	a) Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki posyandu remaja aktif	Desa/ Kelurahan	1000	2000	3000	5000	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase Puskesmas yang membina Posyandu Lansia di 50% Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya	Persentase	50	55	60	65	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		3) Melakukan pembinaan posyandu	Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persentase	70	90	100	100	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

4) Melaksanakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		4) Melaksanakan posyandu aktif	a) Jumlah daerah yang Desa-nya melaksanakan fungsi posyandu dalam pelayanan sosial dasar	Desa	8 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa	8 Provinsi dan 750 Desa	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Jumlah lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan posyandu yang dibina	Jumlah lembaga PKK dan posyandu yang dibina	-	4500	4500	4500	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		5) Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (Puskesmas-SLRT)	a) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Puskesmas-SLRT	Kabupaten /Kota	280	84	514	514	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa/Kelurahan
			b) Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesmas-SLRT	Desa/ Kelurahan	560	168	1028	1028	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa/Kelurahan

6) Pelayanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		6) Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	a) Angka prevalensi kontrasepsi modern	Persentase	62,16	62,54	62,92	62,41	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase <i>unmet need</i> pelayanan KB	Persentase	8,3	8	7,7	7,4	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			c) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi ( <i>Drop Out/DO</i> )	Persentase	24,5	23,1	21,59	20	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			d) Persentase Kabupaten/Kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Persentase	87	88	89	90	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

e) Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			e) Persentase pelayanan KB pasca melahirkan	Persentase	27	50	60	70	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		7) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase kelompok KPM dan Program PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan gizi	Persentase	-	80	85	90	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
	b. Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian <i>stunting</i>	1) <i>Screening</i> kesehatan bagi calon pengantin	Cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Persentase	-	70	80	90	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		2) Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga (relasi suami-istri, menyiapkan kehamilan, pengasuhan, pola konsumsi makanan sehat dan bergizi) bagi calon PUS/ calon pengantin selama 3 bulan pranikah	Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah	Persentase	-	70	80	90	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, BKKBN
		3) Pendampingan ibu hamil	Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>stunting</i>	Persentase	-	70	80	90	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, BKKBN
		4) Pemeriksaan <i>Antenatal Care</i> (ANC) bagi ibu hamil	Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase	89	91	93	95	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa

5) Pemberian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		5) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil	a) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persentase	50	60	70	80	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD	Persentase	-	-	-	58	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		6) Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase	82	85	87	90	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		7) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase	70	75	80	85	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		8) Pelayanan KB pasca persalinan	Terselenggaranya pelayanan KB pasca persalinan	Persentase	27	50	60	70	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		9) Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur (variasi) (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia di bawah tiga tahun (baduta)	Persentase KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau MPASI	Persentase	-	80	85	90	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa

10) Pendampingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		10) Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan, dan pelayanan kesehatan	a) Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS)	Persentase	46,02	47,02	48,02	49,02	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase keluarga anak usia 5-6 tahun yang menggunakan KKA	Persentase	23,01	23,51	24,01	24,51	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
	c. Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka kesiapan sekolah	Persentase	75,29	75,38	75,59	75,79	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		2) Pemberian pendidikan dasar dan menengah	a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	Persentase	99,28	99,30	99,32	99,34	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

b) APS ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			b) APS 13-15 tahun	Persentase	95,93	96,12	96,31	96,50	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SLB/ sederajat	Persentase	96,65	97,77	98,88	100	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			d) APK pendidikan tinggi	Persentase	34,56	35,62	36,64	37,63	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		3) Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga	a) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah (bagi yang beragama Islam)	Pasangan	55.800	73.800	91.800	109.800	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

b) Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			b) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia (bagi yang beragama Katolik)	Pasangan	3.387	4.808	4.000	7.000	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			c) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani (bagi yang beragama Kristen)	Pasangan	35	35	35	35	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			d) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah (bagi yang beragama Hindu)	Pasangan	1500	1700	2000	2500	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			e) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya (bagi yang beragama Budha)	Pasangan	1000	1500	2000	2500	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		4) Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	Persentase	82	84	86	88	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		5) Pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga dengan status miskin	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	Persentase	96,16	98	99,16	99,63	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		6) Penyelenggaraan pendidikan literasi dalam pendidikan	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi literasi	Persentase	58,2	59,2	60,2	61,2	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

7) Koordinasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		7) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki wahana kreativitas dan olahraga	Persentase	-	50	70	90	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
	d. Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan	1) Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan tunai bersyarat	Persentase	-	70	80	90	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa
		2) Pemberian bantuan pangan non-tunai kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan pangan non-tunai	Persentase	-	80	85	90	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa

3) Pemberian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		3) Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai PBI	Persentase	-	80	85	90	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa
	e. Pemberdayaan ekonomi keluarga	1) Pemberian PKH kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	Persentase KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Persentase	20	20	20	20	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		2) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Persentase KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya	Persentase	4,36	4,56	4,78	5,01	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

3) Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		3) Meningkatnya kepemilikan aset produktif bagi keluarga miskin dan rentan	a) Persentase KPM yang mengakses pendanaan dan ketrampilan pengelolaan usaha serta pendampingan sosial ekonomi	Persentase	4,36	4.56	4,78	5,01	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
			b) Persentase KPM yang mendapatkan dukungan mitra usaha	Persentase	7	9	11	15	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		4) Penyaluran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	Jumlah penyaluran dana bergulir untuk koperasi	KUMKM	12600	12800	13000	13200	Kementerian Koperasi dan UKM	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

5) Promosi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		5) Promosi dan pemasaran koperasi dan UMKM	Jumlah KUKM Mitra yang terlayani	UMKM	10000	10000	10000	10000	Kementerian Koperasi dan UKM	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		6) Pelatihan <i>e-commerce</i> bagi usaha mikro	Terselenggaranya pelatihan <i>e-commerce</i> bagi usaha mikro	Usaha Mikro	3400	3400	3400	3400	Kementerian Koperasi dan UKM	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		7) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas	Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	Kampung Keluarga Berkualitas	15954	38450	60944	83441	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, BKKBN
		8) Meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga	Persentase keluarga yang berwirausaha	Persentase	11,2	11,7	12,2	12,7	BKKBN	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
		9) Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Nelayan	-	2000	2000	2000	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
		10) Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	-	33.210.413	36.531.454	40.184.600	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum, serta sanitasi dasar	1) Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	Persentase	-	80	90	100	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan
		2) Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	a) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persentase	57,46	58,02	58,71	59,48	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

b) Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			b) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kabupaten/Kota	Persentase	93,80	95,90	97,90	100	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BKKBN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan

c) Persentase ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024		
			c) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Persentase	79,43	82,07	86,03	90	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO